

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini harus didukung penuh oleh peningkatan kinerja birokrasi karena birokrasi sangat berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Birokrasi sangat berperan penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, karena birokrasi menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta menentukan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Raffi et al., 2020). Smart birokrasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan e-government karena pada era sekarang birokrasi harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan atau cara kerja birokrasi yang dulunya masih dilakukan secara manual kini harus berbasis teknologi sehingga pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Mewujudkan smart birokrasi salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menemukan dan memberikan gagasan baru dalam pemerintahan agar meningkatkan semangat reformasi birokrasi, karena ASN berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-4 yaitu *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”*. Untuk mewujudkan smart birokrasi yaitu dengan meningkatkan kompetensi ASN dengan langkah-langkah seperti mengadakan diklat agar kinerja ASN semakin baik lagi.

Perkembangan dunia digital di era globalisasi menuntut semua manusia dan aspek kehidupan untuk beralih ke sistem digital. Guna mempermudah seluruh akses pekerjaan yang dilakukan. Dalam tiga dekade terakhir, banyak cara untuk menyediakan layanan pemerintah telah berubah di dunia, berkat penggunaan Internet. Semua pemerintah diseluruh dunia telah berpikir untuk mengadopsi penyediaan layanan secara elektronik, dan telah muncul e-government, memiliki

nama lain, yaitu layanan publik elektronik (Mutiarin, 2021). Pada UU No. 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sistem pemerintahan harus berbasis IT dan internet, atau sering kita sebut sebagai konsep e-government. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk mempermudah pekerjaan pemerintah baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat saat ini karena informasi dapat diakses darimana saja dan penyebaran informasi terjadi sangat cepat tanpa adanya batasan jarak dan waktu (Raffi et al., 2020).

Konsep e-government dapat mempermudah kinerja pemerintah dalam menjalankan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam suatu daerah. E-government juga dapat mempermudah masyarakat untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, agar pemerintah juga dapat berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu, informasi yang dimiliki pemerintah di sampaikan melalui media online nasional (Nurjanah et al., 2021). Dengan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat maka pelaku pembangunan yaitu pemerintah dapat menentukan program kerja yang akan menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah merupakan penyedia atau pelayan publik, untuk itu perlu memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Eldo & Mutiarin, 2019).

Konsep e-government dinilai efektif untuk masa sekarang, karena pada masa pandemi sekarang masyarakat akan lebih mudah untuk mencari informasi melalui internet atau situs resmi pemerintah, adanya e-government diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan serta mendapatkan informasi tentang pembangunan akan lebih mudah sehingga diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan diperuntukkan untuk masyarakat, untuk itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut karena masyarakat lebih tau apa yang mereka butuhkan untuk pembangunan daerah mereka.

Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur, adil dan berkelanjutan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu sistem perencanaan yang baik. Untuk mempercepat proses pelaporan data dan penginformasian data dalam proses perencanaan pembangunan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yaitu dengan berbasis web, agar proses penginputan data dapat berjalan cepat yaitu dengan memanfaatkan database, dengan menggunakan sistem berbasis web tentunya memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas sehingga pemerintahan lebih efektif lagi. Data yang dihasilkan dari web tersebut dapat berupa data Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam jangka singkat yaitu selama 1 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun (Yuswardi, 2019).

Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan sangat matang, untuk itu pemerintah perlu melakukan inovasi perencanaan pembangunan baik dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk pendukung pembangunan agar lebih baik pemerintah mengusulkan untuk melakukan inovasi pada sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi saat ini, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi akan mempermudah pemerintah untuk melakukan pendataan, menginput data, membagikan data kepada masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Apabila perencanaan pembangunan berbasis website tentu saja memberikan banyak sekali manfaat seperti efisien waktu, tenaga dan lain sebagainya.

Pemerintah Yogyakarta telah mengembangkan sebuah web yang bernama Dataku. Aplikasi Dataku merupakan hasil dari pengembangan Sistem Informasi Profit Daerah (SIPD) didalam aplikasi Dataku memuat data-data yang berkaitan dengan pembangunan. Data-data yang berada didalam dataku digunakan untuk bahan perencanaan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran karena didukung oleh data. Dengan adanya aplikasi dataku ini sangat

membantu sekali karena informasi yang disediakan Dataku tentang pembangunan sudah terbilang sangat lengkap, sehingga apabila kita ingin mencari data tentang pembangunan tinggal buka saja aplikasi Dataku diinternet.

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu salah satunya yaitu Dataku yang dibangun untuk memudahkan dan meningkatkan kesadaran serta komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi sehingga meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang muktahir dan akurat. Dataku mendukung penyajian data secara cepat, tepat dan akurat serta infrastruktur bagi pengambilan keputusan ditingkat daerah. Dengan adanya dataku meningkatkan koordinasi antar daerah, berbagi informasi secara cepat, dan komunikasi data menjadi lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyesuaikan format dan jenis data yang baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dataku DIY merupakan aplikasi resmi milik pemerintah Yogyakarta yang terdiri dari 7 (tujuh) menu utama yaitu:

1. Infografik yang menyediakan data tentang kemiskinan yang ada di daerah Yogyakarta serta ketimpangan-ketimpangan yang ada.
2. Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan Berkelanjutan) menu ini berisi agenda pembangunan dunia untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara global. Agenda pembangunan berkelanjutan dunia yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target, target dan tujuan tersebut telah di setujui oleh 193 tanpa terkecuali Indonesia. Menu tersebut menjadi gambaran bahwa perencanaan pembangunan DIY mendukung jalannya rencana tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam target SDGs, jadi masyarakat bisa melihat dan mengamati tujuan dan target tersebut diaplikasi Dataku.
3. RPJMD, menu ini merupakan modul yang dapat menghasilkan format dan data-data profil daerah yang bersangkutan untuk memudahkan proses penyusunan RPJMD. Dalam tahap

penyusunan RPJMD dibutuhkan data-data yang bisa menggambarkan keadaan DIY saat ini. Data-data tersebut yang menjadi landasan pemerintah DIY dalam menyusun rencana program RPJMD, sehingga proses perencanaan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran.

4. Data utama merupakan data yang paling banyak dicari, karena perencanaan pembangunan yang didokumentasikan oleh dataku mencapai ribuan maka melalui menu data utama, data tersebut di pilih berdasarkan data yang paling sering dibutuhkan atau dicari sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses data-data tersebut. Data utama dikelompokkan berdasarkan bidang urusan dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Agar data utama mudah dipahami oleh masyarakat banyak maka data tersebut disajikan lebih ringkas dalam bentuk grafik sehingga bisa dipahami dalam waktu singkat.
5. Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada dimensi: kesejahteraan, pemerataan, produktivitas, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.
6. Indikator Kerja Pemda, menu ini menampilkan kinerja pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pelayanan dan pembangunan berdasarkan data indikator kinerja utama yang bersumber dari RPJMD, sehingga masyarakat dapat menilai, mengawasi dan mengawal kinerja pemerintah DIY sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

7. Menu Lainnya memuat 5 pilihan yaitu, *pertama* publikasi dan hasil kajian, *Kedua* informasi statistik, *Ketiga* GIS, banyaknya versi peta yang tersebar diinternet namun belum akurat kebenarannya pemerintah DIY menciptakan sistem aplikasi spesial (GIS) yang menjamin keakuratan data yang dirilis dan dipublikasikan, *Keempat* FAQ (Frequently Ask Question), menu ini menampilkan pertanyaan yang seringkali diajukan pada Dataku, *Kelima* menu kontak kami, berisi alamat kantor BAPPEDA, telepon, dan email.

Berdasarkan uraian diatas yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana birokrasi memanfaatkan aplikasi Dataku untuk perencanaan pembangunan dan bagaimana dataku dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan smart bureaucracy dalam e-government khususnya dalam aplikasi Dataku ?
2. Bagaimana manfaat aplikasi Dataku untuk perencanaan pembangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan smart bureaucracy dalam e-government khususnya pada Aplikasi Dataku.
2. Mengetahui sejauh mana manfaat yang diberikan oleh Aplikasi Dataku untuk perencanaan pembangunan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami informasi terkait penerapan smart bureaucracy dalam e-government khususnya dalam aplikasi Dataku.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap penggunaan Dataku.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat terhadap aplikasi Dataku DIY.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penggunaan aplikasi Dataku.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Smart Birokrasi dalam E-government**

Pada bab ini akan dijelaskan yang pertama yaitu kajian pustaka yang digunakan sebagai struktur umum untuk menginterpretasikan masalah yang akan dipelajari dan memperjelas hubungan yang akan digunakan dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan smart bureaucracy dalam e-government dalam perencanaan pembangunan, dengan studi yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua kerangka teori, ini akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga kerangka berfikir, ini menjelaskan road map penelitian ini agar lebih jelas terarah. Keempat Definisi Konseptual, ini menjelaskan secara abstrak melalui konsep peneliti yang diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dalam penelitian ini. Kelima Definisi Operasional, menjelaskan beberapa variabel dan parameter penelitian ini.

“Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan e-Government di Indonesia: Analisa WebSite” Yunita & Aprianto, (2018). Penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan website untuk mengetahui kondisi terkini perkembangan E-government di Indonesia dengan melakukan penilaian terhadap 534 website pemerintah daerah kemudian nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke model-model tahapan e-government, langkah-langkah tersebut kemudian disesuaikan dengan tahapan e-government yang mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government”. Pengembangan e-government dilakukan melalui empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pematapan dan pemanfaatan, dari empat pengembangan ini dapat di nilai perkembangan e-government. Evaluasi e-government di Indonesia dilakukan oleh Direktorat e-government Kemkominfo melalui Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI), evaluasi tersebut dilakukan secara berkala. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 melalui empat tahapan pengembangan, yang mana tahapan pengembangan ini yang nantinya akan menjadi acuan untuk penilaian, berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian Indonesia masih tergolong lambat dalam proses pengembangan. Penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada smart birokrasi untuk mewujudkan e-government. E-government menjadi fokus, karena smart birokrasi merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan e-government.

“Desain Reformasi Birokrasi Melalui Role Model Pelayanan Publik Berbasis Smart Pada Pemerintahan Kota Bima” Abdul Kadir, (2019). Penelitian ini membahas tentang bagaimana desain reformasi birokrasi melalui role model pelayanan berbasis smart pada pemerintah kota Bima, yang mana aparatur birokrasi merupakan teladan bagi masyarakat sekaligus contoh bagi masyarakat, birokrasi selama ini sering disalahgunakan oleh para pejabat pemerintah sehingga menimbulkan



kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat birokrasi, untuk itu perlu dilakukannya reformasi birokrasi salah satunya dengan melakukan role model dalam pelayanan publik, agar menjadi contoh dan teladan yang baik untuk masyarakat. Reformasi birokrasi yang dilakukan dalam bentuk role model pelayanan yang berbasis smart diuraikan menjadi systemic, monitorable, accessible, reliable, time bound. Sistem informasi yang terdapat di kota Bima untuk mewujudkan e-government ada tiga yaitu Sapawarga merupakan sarana komunikasi dan interaksi masyarakat yang terhubung juga ke Government Resources Management System (GRMS) merupakan sistem pengelolaan sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan yang ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen (SIM), ketiga sistem ini saling berkaitan.

“Analisis Penuasaan Teknologi Dalam Kesiapan Kota Kediri Menuju Kota Cerdas (Smart City)” Limantara et al, (2020). Membahas tentang gerakan menuju 100 Smart City program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, gerakan ini digencarkan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, dalam pelaksanaan gerakan smart city terdapat 6 indikator yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Dalam penelitian ini pemerintah harus lebih gencar lagi untuk memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mencari, atau memantau perencanaan pembangunan daerah.

“Kosistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah” Sugianto & Mutiarin, (2017). Penelitian ini membahas tentang bagaimana kosistensi pemerintah dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, karena sama-sama kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif. Proses perencanaan disetiap daerah umumnya, namun yang membedakan adalah partisipasi dari masyarakat daerah tersebut, musrenbang merupakan salah satu upaya untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

“Ipteks Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”(Lintang & Mintalangi, 2018). Studi kasus Provinsi Sumatera Utara menjelaskan tentang bagaimana cara membangun sebuah sistem pemerintahan yang terintegrasi, yaitu menjalankan sebuah sistem SPIP dengan memenuhi unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. BAPPEDA Prov. Sulut dalam mewujudkan tugas dan fungsinya bisa tercapai apabila dapat menyesuaikan dan menjalankan elemen SPIP dengan baik.

“Penerapan Good Governance Berbasis e-Government dan Revormasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh” Jauhari et al, (2015). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa e-government berhubungan dengan penerapan good governance, terdapat tiga hal yang dapat meningkatkan good governance dalam teknologi komunikasi yaitu, peningkatan transparansi, informasi dan akuntabilitas, memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektifitas pelayanan publik. Pada penelitian ini menjelaskan adanya hubungan yang positif antara e-government dan good governance, salah satunya yaitu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas, penerapan e-government mampu memberikan kemudahan dalam urusan pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

“Konsep E-Office Menuju Perubahan Pelayanan Birokrasi Berbasis Digital (Good Governance)” Diana, B. A. (2019). Pada jurnal ini

menjelaskan bagaimana pemerintah harus merubah pelayanan yang masih dilakukan secara tradisional kedalam pelayanan yang sudah berbasis teknologi seperti *e-office*. E-office merupakan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan seperti administrasi perkantoran yang berbentuk aplikasi, sistem ini dibuat dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN). Dalam mewujudkan hal tersebut tak luput dari peran birokrasi sebagai penyedia jasa pelayanan publik, birokrasi sangat berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbentuk digital, agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien baik dalam segi waktu maupun pelayanan.

“Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk Peningkatan e-Government dalam Pelayanan Publik” Wardiningsih, (2009). Jurnal ini membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam upaya peningkatan e-government dalam melaksanakan pelayanan publik, teknologi dan sistem informasi memberikan banyak sekali dampak dan manfaat terhadap pelayanan contohnya dalam akuntansi seperti *planning, organizing, directing* dan *controlling*. E-government merupakan salah satu cara untuk melakukan perubahan dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan sistem ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti, keterbatasan akses data lintas instansi dan lain-lain. Namun pemerintah masih tetap terus berupaya dalam pengembangan teknologi informasi agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Oktavya, (2015) jurnal ini membahas tentang keberhasilan penerapan e-government pada website pajak.go.id dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor pelayanan pajak Kota Bontang sudah menerapkan sistem elektronik pemerintah atau e-government dalam pelayanan pajak terutama pada masyarakat yang sudah wajib pajak, namun dalam penerapan sistem tersebut masih banyak terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintah, kurangnya

kesiapan SDM dalam pelayanan pajak karena banyak nya jabatan yang diisi tidak sesuai dengan bidangnya, sistem e-government masih belum menjadi perhatian dalam pengembangan khususnya dalam masalah anggaran. Kekurangan-kekurangan dalam sistem ini perlu diperbaiki agar pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan bersama.

“Penerapan e-Government dalam Pelayanan Publik” Lia & Shofwan, (2020). Jurnal ini membahas tentang peran dari e-government dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah, dalam penerapan e-government yang menjadi prioritas dalam pelayanan adalah kebutuhan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu menyiapkan sumber daya untuk penerapan sistem e-government agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, karena yang sering menjadi masalah dipemerintah adalah dalam pelayanan publik adalah pengelolaan yang tidak berjalan efektif. Pelayanan yang dilakukan dengan baik akan menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penggunaan sistem e-government sudah menjadi keharusan oleh pemerintah karena merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas umumnya membahas tentang penerapan dan penggunaan sistem e-government perbedaan penelitian antara peneliti dengan yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitiannya, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pelayanan publik dan e-government, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang inovasi pelayanan dalam bentuk web untuk perencanaan pembangunan dan smart birokrasi dalam e-government terkhusus pada aplikasi Dataku.

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya Terkait Smart Bureaucracy dalam E-Government pada Pemanfaatan Dataku dalam Perencanaan Pembangunan

Peneliti	Judul	Hasil
(Yunita & Aprianto, 2018)	Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan e-Government di Indonesia: Analisi WebSite	pengembangan e-government mengacu pada Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 melalui empat tahapan pengembangan, yang mana tahapan pengembangan ini yang nantinya akan menjadi acuan untuk penilaian, berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian Indonesia masih tergolong lambat dalam proses pengembangan. Penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada smart birokrasi untuk mewujudkan e-goverment.
(Vinet & Zhedanov, 2010)	Desain Reformasi Birokrasi Melalui Role Model Pelayanan Publik Berbasis Smart Pada Pemerintahan Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan kepemimpinan dalam role model pelayanan publik publik berbasis smart City</li> <li>- Peran aparatur dengan role model, melalui pelayanan publik secara optimal</li> <li>- Penggunaan aplikasi teknologi dalam pelayanan publik</li> <li>- Penggunaan jaringan internet untuk pelayanan terpadu</li> </ul>
(Limantara et al., 2020)	Analisis Penguasaan Teknologi Dalam Kesiapan Kota Kediri Menuju Kota Cerdas (Smart City)	Kediri berada pada level 3 kota cerdas dan sedang berusaha untuk naik pada level 5, untuk mewujudkan hal tersebut perlu digencarkan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi, dalam pelaksanaan gerakan smart city terdapat 6 indikator yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
(Sugianto & Mutiarin, 2017)	Kosistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah	Proses perencanaan di setiap daerah umumnya, namun yang membedakan adalah partisipasi dari masyarakat daerah tersebut, musrenbang merupakan salah satu upaya untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi

		dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran.
(Lintang & Mintalangi, 2018)	Ipteks Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	menjelaskan tentang bagaimana cara membangun sebuah sistem pemerintahan yang terintegrasi, yaitu menjalankan sebuah sistem SPIP dengan memenuhi unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internet.
(Jauhari et al., 2015)	Penerapan Good Governance Berbasis e-Government dan Revormasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh	e-government berhubungan dengan penerapan good governance, terdapat tiga hal yang dapat meningkatkan good governance dalam teknologi komunikasi yaitu, peningkatan transparansi, informasi dan akuntabilitas, memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektifitas pelayanan publik.
(Diana, B. A., 2019)	Konsep E-Office Menuju Perubahan Pelayanan Birokrasi Berbasis Digital (Good Governance)	Pelayanan dalam bentuk digital harus terus di tingkatkan, E-office merupakan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan seperti administrasi perkantoran yang berbentuk aplikasi, sistem ini dibuat dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN). Dalam mewujudkan hal tersebut tak luput dari peran birokrasi sebagai penyedia jasa pelayanan publik, birokrasi sangat berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbentuk

		digital.
(Wardiningsih, 2009)	Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk Peningkatan e-Government dalam Pelayanan Publik	Pemerintah perlu meningkat kan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman, karena teknologi di nilai sangat penting untuk menunjang pencapaian pemerintah. Teknologi dan sistem informasi memberikan banyak sekali dampak dan manfaat terhadap pelayanan contohnya dalam akuntansi seperti <i>planning, organizing, directing</i> dan <i>controlling</i>
(Lia & Shofwan, 2020)	Penerapan e-Government dalam Pelayanan Publik	dalam penerapan e-government yang menjadi prioritas dalam pelayanan adalah kebutuhan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu menyiapkan sumber daya untuk penerapan sistem e-government agar berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, karena yang sering menjadi masalah di pemerintah adalah dalam pelayanan publik adalah pengelolaan yang tidak berjalan efektif.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Smart bureaucracy

Birokrasi dalam konteks politik dapat diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, para pejabat birokrasi memiliki wewenang menentukan kebijakan yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi (Sawir, 2020). Karena birokrasi merupakan organisasi yang mengurus dan menjalankan pemerintahan, maka birokrasi dianggap organisasi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan tanpa alasan birokrasi mengurus kebutuhan mulai dari lahir sampai meninggal contohnya, apabila seseorang ingin menikah makan perlu mengurus surat-surat di KUA karena apabila dari pernikahan akan menghasilkan anak maka surat-surat tersebut dibutuhkan untuk membuat akte kelahiran anaknya, dan apabila anaknya menginjak usia remaja minimal 17 tahun makan akan dibutuhkan KTP yang diurus oleh kantor pencatatan sipil (Setiyono, 2012)

Pada organisasi pemerintah birokrasi merupakan suatu organisasi struktur dan prosedur yang didalamnya terdapat tujuan-tujuan tertentu. Birokrasi dirancang untuk menyelesaikan tugas administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai dengan struktur birokrasi yang banyak diwarnai oleh aparatur selaku abdi negara, pada pemerintahan birokrasi merupakan penyedia atau pemberi pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan dunia, birokrasi mengalami banyak perubahan yang harus mengikuti perkembangan zaman.

Revolusi industri 4.0 mendorong semua pihak untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat dan cepat. Revolusi industri sejalan dengan reformasi birokrasi, salah satu wujud dari reformasi birokrasi adalah smart birokrasi (Faedlulloh et al., 2020). Smart bureaucracy merupakan proses kerja yang efektif, efisien serta pelayanan yang berbasis teknologi terintegrasi, proses kerja dengan menggunakan platform teknologi informasi yang bersifat koordinasi, kolaborasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal sehingga memudahkan untuk mengakses informasi, serta informasi dapat tersedia secara cepat dan akurat.

Konsep smart bureaucracy secara umum memiliki kesamaan dengan konsep smart city, karena sama-sama memiliki tujuan memberikan pelayanan yang berbasis teknologi terkini kepada masyarakat serta membangun infrastruktur yang pintar agar terciptanya pelayanan yang efektif, sama dengan smart birokrasi yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Insani, 2017).

### **1.6.2 E-Government**

E-government merupakan singkatan dari elektronik pemerintah, yang memiliki arti pemerintahan yang berbasis digital, dengan memanfaatkan teknologi. E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah agar lebih mudah dan lebih cepat, dengan memanfaatkan teknologi pemerintah akan lebih cepat bertukar informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan teknologi komunikasi pemerintah diharapkan lebih optimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti menyediakan informasi yang update kepada masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan pemerintah.

#### **1.6.2.1 Tujuan Sistem e-Government**



E-government merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan. Bentuk kesiapan pemerintah Indonesia dalam menerapkan sistem e-government, pemerintah mengeluarkan Ipres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, Ipres tersebut dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. World Bank (Yunita & Aprianto, 2018) menjelaskan empat tujuan sistem e-government yaitu:

- a. Membuka akses yang lebih besar terhadap informasi pemerintah.
- b. Mempromosikan keterlibatan masyarakat dengan memberikan peluang masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.
- c. Sistem e-government diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab dengan membuat sistem pemerintah lebih transparan untuk mengurangi kemungkinan pejabat pemerintah korupsi.
- d. Diharapkan dengan menggunakan sistem e-government adanya pengembangan terutama pada masyarakat pedesaan maupun masyarakat tradisional yang kurang terlayani

Penggunaan sistem e-government diharapkan mampu memberikan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya berbentuk tradisional menuju sistem yang modern yang lebih mudah, namun untuk mewujudkan sistem e-government harus mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlandaskan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dalam peraturan tersebut terdapat tujuh prinsip pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu, efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, interoperabilitas dan aman.

#### 1.6.2.2 Manfaat Sistem e-Government

Pada penerapan sistem e-government banyak sekali memberikan dampak positif khususnya dalam pelayanan publik. Manfaat-manfaat tersebut antara lain (Wirawan, 2020):

- a. Mengurangi biaya, karena pelayanan yang dilakukan secara online, secara tidak langsung akan mengurangi biaya administrasi, relasi dan interaksi.
- b. Mendukung perkembangan ekonomi, karena teknologi memudahkan pemerintah dalam memunculkan iklim bisnis yang positif.
- c. Memperkuat terciptanya transparansi dan akuntabilitas, karena proses yang dilakukan secara online, baik mulai dari proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.
- d. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, karena sistem sudah berbasis online maka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh informasi 24 jam tanpa dapat langsung ke kantor pemerintahan.
- e. Memberdayakan masyarakat, karena akses informasi yang mudah diharapkan menarik minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik

### **1.6.3 Definis Konseptual**

#### 1.6.3.1 Smart Bureaucracy

Smart bureaucracy merupakan proses kerja yang efektif, efisien serta pelayanan yang berbasis teknologi terintegrasi, proses kerja dengan menggunakan platform teknologi informasi yang bersifat koordinasi, kolaborasi dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal sehingga memudahkan untuk mengakses informasi, serta informasi dapat tersedia secara cepat dan akurat

#### 1.6.3.2 E-government

E-government merupakan singkatan dari elektronik pemerintah, yang memiliki arti pemerintahan yang berbasis digital, dengan memanfaatkan teknologi. E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah agar lebih mudah dan lebih cepat, dengan memanfaatkan teknologi pemerintah akan lebih cepat bertukar informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penggunaan teknologi komunikasi

pemerintah diharapkan lebih optimal lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti menyediakan informasi yang update kepada warga nya dan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan urusan pemerintah.

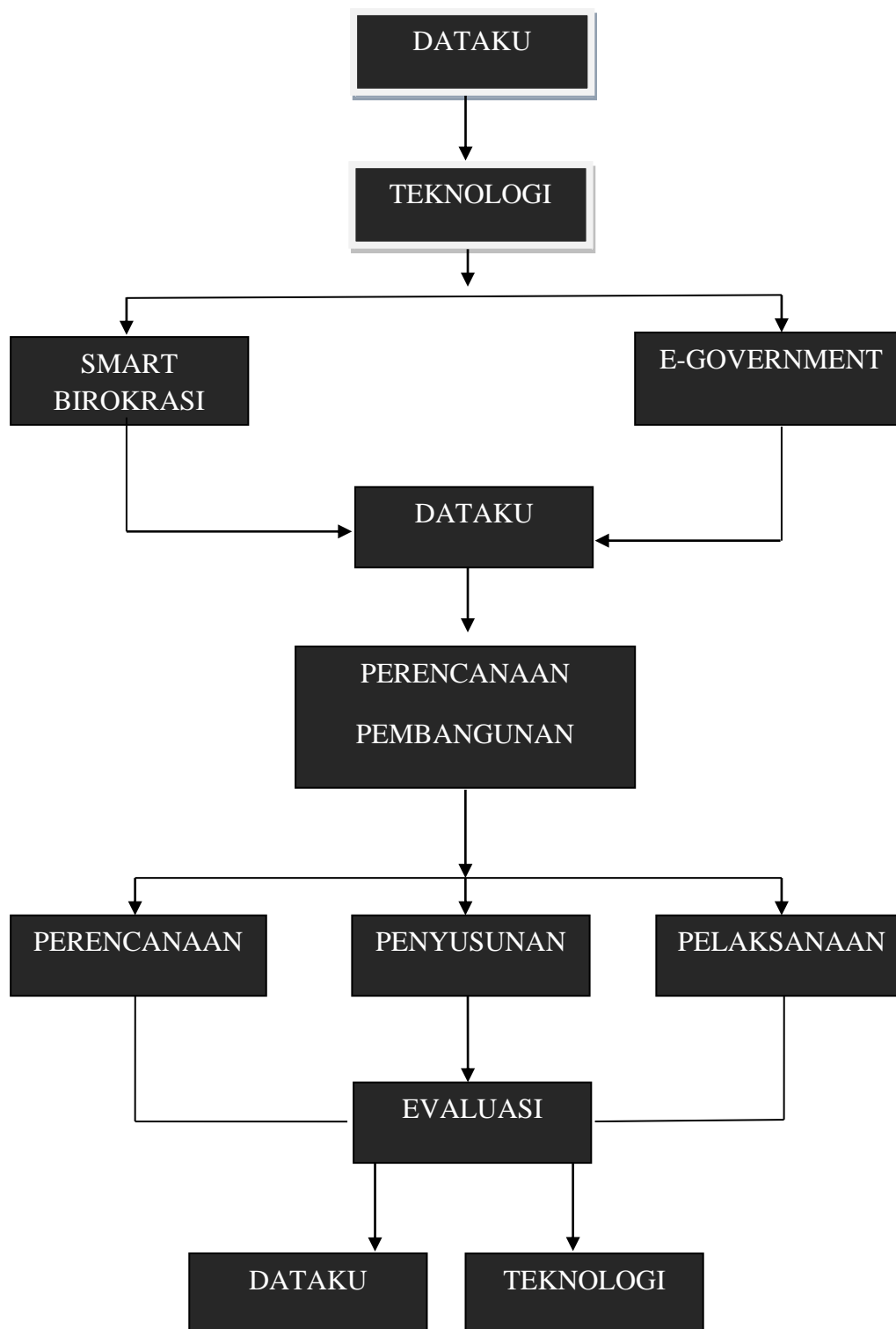
### 1.7 Defnisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana smart bureaucracy dalam memanfaatkan dataku untuk perencanaan pembangunan DIY.

Tabel 2 Defenisi Operasional

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Smart Bureaucracy	Pelayanan	Pelayanan berbasis IT
	Peningkatan	Peningkatan kualitas pelayanan oleh birokrasi pemerintah
	Pengembangan	Pengembangan pelayanan berbasis digital
	Keterlibatan	Keterlibatan birokrasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan berbasis digital
	Tanggung jawab	Tanggung jawab birokrasi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis digital
E-Government	Akuntabilitas	Memperkuat terciptanya akuntabilitas
	Kemudahan	Kemudahan dalam pelayanan publik
	Efisien	Efisien waktu, biaya dan tenaga pemerintah
	Transparan	Pemerintah lebih transparan untuk mengurangi kemungkinan pejabat pemerintah korupsi

### 1.8 Kerangka Fikir



## ***Gambar 1. Kerangka fikir (sumber: penulis)***

### **1.9 Metode Penelitian**

#### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Mengenai metode penelitian kualitatif, Rukin, mendefinisikannya sebagai suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sedangkan menurut Suwendra mengenai konsep dasar penelitian kualitatif, terdapat 3 hal pokok yang terkandung didalamnya yang meliputi: (1) ada kepekaan terhadap sebuah masalah yang muncul secara alamiah dalam suatu lingkungan, (2) adanya keinginan untuk mengkaji lebih mendalam dalam arti menelitinya, (3) ingin memaknai suatu fenomena (aktifitas sosial, peristiwa, sikap, persepsi dan pemikiran) yang terjadi dalam kehidupan sosial (Susilo, 2009)

Dalam penelitian kualitatif, terdapat lima pendekatan yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Lima pendekatan tersebut adalah pendekatan naratif ,fenomenologis, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, 2020) dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus karena memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, & Atmojo, (2020), pendekatan studi kasus mengkaji suatu kasus, keputusan, atau lebih (membandingkan) dalam sebuah kehidupan nyata yang sedang terjadi untuk suatu tujuan tertentu, dengan mengumpulkan data secara detail dan mendalam melalui berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dokumen, laporan, arsip dan audiovisual.

#### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Kepatihan, Jl. Malioboro, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mengetahui smart birokrasi dalam e-government pada pemanfaatan Dataku sebagai sumber data perencanaan pembangunan di DIY, karena Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan provinsi DIY.

### **1.9.3 Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data nantinya akan dijadikan sebagai sumber data yang nantinya akan menentukan kualitas penelitian, makadari itu peneliti mempunyai dua sumber data yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian, data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen langsung yang telah ditetapkan sebelumnya, data primer berupa dokumen penelitian asli yang dikumpulkan dari kondisi sebenarnya dimana ketika peristiwa itu terjadi maka disebut data primer. Data primer dalam penelitian ini mengkaji beberapa indikator seperti Pelayanan berbasis IT oleh pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan oleh birokrasi pemerintah, keterlibatan birokrasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan berbasis digital, meningkatkan pelayanan, kemudahan dalam pelayanan publik, efisien waktu, biaya dan tenaga pemerintah dalam pelayanan berbasis digital.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan data primer seperti studi terdahulu, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan data yang hendak dicari. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen yang bersumber dari internet, buku, jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti dan website Bappeda DIY.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data terkait dengan Smart bureaucracy Dalam e-Government Pada Pemanfaatan Dataku Untuk Perencanaan Pembangunan di DIY studi kasus Web Dataku Bappeda DIY, data di analisis menggunakan fitur Ncapture di Chrome dan diinput pada data Nvivo 12 plus yang merupakan aplikasi analisis data.

#### **1.9.4.1 wawancara**

Wawancara merupakan proses mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian, pertanyaan yang diajukan sudah disiapkan terlebih dahulu untuk menjadi acuan pertanyaan dalam wawancara, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu:

Tabel 3 Daftar Narasumber

<b>Informan</b>	<b>Position</b>
Danang Setiadi, S.IP, MT	Kepala Bidang Perencanaan
Emy Kuspariyati, SE, M.Sc, M,Eng	Kepala Subbidang Singkronisasi Perencanaan Pembangunan
Sri Giyanti, S.E., M.T.	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan
Ririn Herini Evilistyani, S.IP, MM	Kepala Seksi Data Dan Statistik
Wiji Lestari, S.IP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPPSD
Galang Yunawan S.Si	Staf Seksi Data dan Statistik
Mohamad Ridwan Santoso S.Si MEng	Staf Seksi Data dan Statistik
Fatimah Budiani Arini	Staf Seksi Data dan Statistik

#### 1.9.4.2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal, arsip yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data yang juga bisa dipakai dalam studi dokumentasi adalah melalui media online, seperti portal berita, youtube, media sosial (facebook, instagram, WA) dan lain sebagainya (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, 2020)

#### 1.9.4.3 Ncapture

Data yang diperoleh dari media sosial diambil dengan metode Ncapture pada aplikasi Nvivo yang menghasilkan jurnal online dan berita online yang berkaitan dengan judul peneliti. Dengan menggunakan Ncapture

kita dapat mengimpor data dari media sosial ke dalam bentuk folder ke aplikasi Nvivo 12 Plus.

### **1.9.5 Teknik Analisi Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Data-data yang telah diperoleh dari berbagai macam cara (wawancara, dan onservasi) akan di proses terlebih dahulu sebelum di gunakan.

Terdapat 4 langkah dalam analisis data menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, 2020) yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, dan penafsiran dan penarikan kesimpulan.

#### **a) Pengumpulan dan pengolahan data**

Data-data yang telah diperoleh baik dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti juga akan menyalin hasil rekaman suara menjadi teks dan selanjutnya memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya.

#### **b) Seleksi data**

Pada tahap ini, data-data yang telah disusun sesuai dengan kategori, akan dipilih dan dipilah kembali data yang berguna dan sesuai untuk digunakan dalam proses analisis.

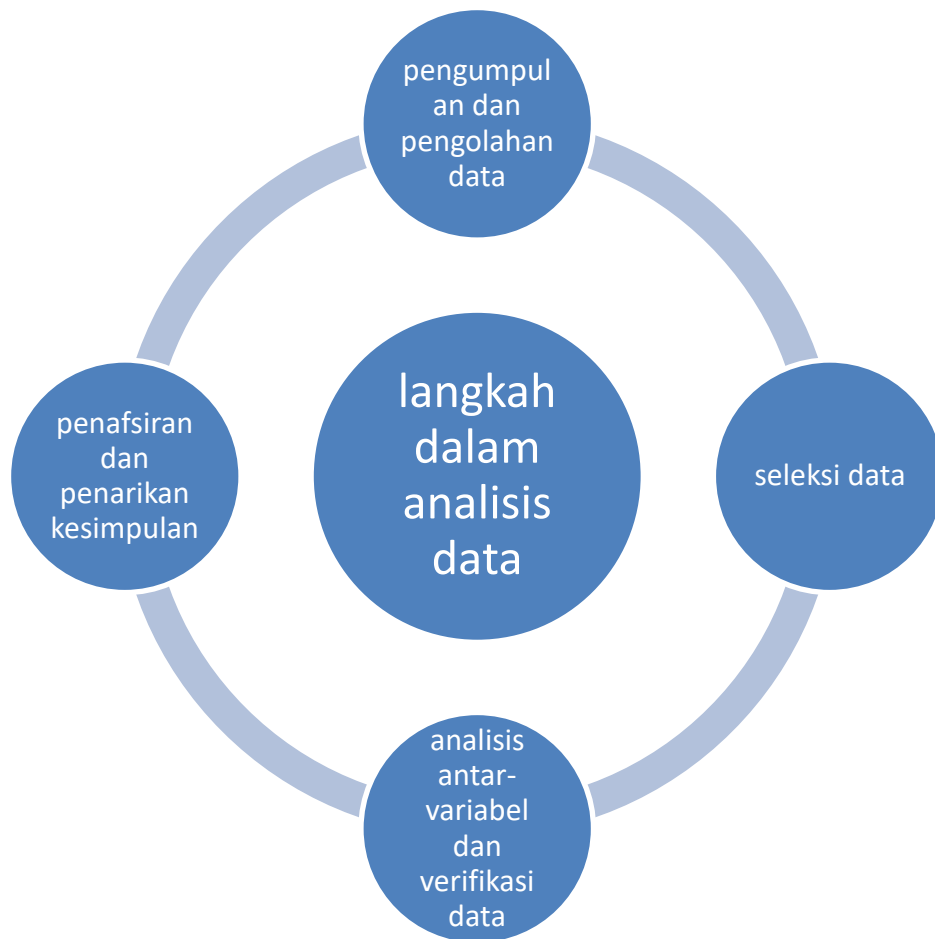
#### **c) Analisis antar variable dan verifikasi data**

Langkah selanjutnya setelah seleksi data adalah menghubungkan antara satu variable atau indikator dengan variable atau indikator lainnya.

#### **d) Penafsiran dan penarikan kesimpulan**

Segala temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Hasil tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar dari peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.





**Gambar 2. Empat langkah dalam Analisis Data**  
 Sumber : Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, (2020)

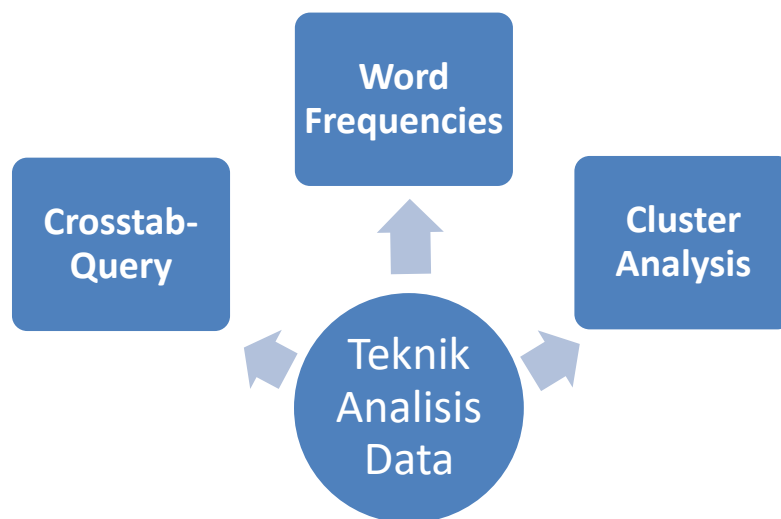
### 1.9.6 Alat Bantu Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh software Ncapture untuk mengimput data yang berkaitan dengan penelitian ke dalam aplikasi Nvivo 12 plus, sehingga artikel atau file yang dibutuhkan lebih mudah untuk didownload dan dimasukan kedalam software Nvivo 12 plus. Analisis data merupakan tahapan mencari dan mengumpulkan data kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan software Nvivo 12 plus, karena di dalam software tersebut banyak terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu:

- a) **Crosstab-Query**: bertujuan untuk memeriksa penyebaran pengkodean di seluruh kasus atau kasus tertentu. Lebih dari itu, *Crosstab Query* dapat menganalisa seberapa

sering responden/ informan saat wawancara mengacu pada topik atau masalah tertentu.

- b) **Word Frequencies:** adalah analisis kata yang paling umum digunakan. Dengan mengecek jumlah kata pada hasil sumber penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui konsep yang sering muncul, misalnya mencari kata-kata yang sering digunakan dalam survei dataset atau melihat seberapa sering responden/ informan mengucapkan kata-kata, sehingga peneliti dapat memeriksa subjektivitas konten atau tidak dalam wawancara.
- c) **Cluster Analysis:** adalah teknik eksplorasi yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan pola dalam project. Dengan mengelompokkan sumber atau node yang memiliki kata yang mirip, nilai atribut yang serupa, atau diberi kode yang serupa oleh node.



*Gambar 3 Teknik Analisis Data*